



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 03 April 2017

Halaman: 16

GAJI JURU PARKIR

Penertiban Parkir Liar

Lebih Prioritas

DANUREJAN—Sejumlah juru parkir meminta kepada Pemkot dan DPRD Kota Jogja untuk mengkaji secara cermat terkait dengan wacana pemberian gaji terhadap juru parkir (jukir).

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Mengingat, masih ada sejumlah kewajiban pemerintah yang belum dilakukan seperti penertiban parkir liar di Kota Jogja. Salah satu juru parkir di Taman Parkir Abd Bakar Ali (ABA) Aji sudah mendengar adanya wacana memberikan gaji kepada juru parkir. Ia menilai rencana itu

Forum komunitas penata parkir (FKPP) Kota Jogja akan mendatangi DPRD Kota Jogja untuk mendesak menyelesaikan persoalan parkir utamanya keberadaan parkir liar.

Penghasilan juru parkir sehari kadang tidak menentu.

dapat menimbulkan persoalan baru di tempat ia bekerja. Karena ia tidak yakin, gaji yang diberikan akan sesuai dengan keinginan juru parkir. Selain itu, banyak janji pemerintah yang belum dilaksanakan pasca relokasi dari parkir di Jalan Malioboro ke Taman Parkir ABA.

"Itu sama dengan membuatkan liang kuburan baru bagi kami di Parkir ABA," ungkapnya saat ditemui *Harian Jogja* di Lantai Kedua Taman Parkir ABA, Minggu (2/4) siang. Pria asal Kasihan, Bantul ini justru berharap eksekutif dan

legislatif di Kota Jogja secara serius menertibkan parkir liar. Karena saat ini bermunculan kantong parkir liar, dari lahan hingga rumah hunian yang itu tidak sesuai peruntukannya. Menurut Selasa (4/4) besok, forum komunitas penata parkir (FKPP) Kota Jogja akan mendatangi DPRD Kota Jogja untuk mendesak menyelesaikan persoalan parkir utamanya keberadaan parkir liar.

"Kewajiban menertibkan parkir liar saja belum terlaksana, lha kok mau ada rencana seperti itu," ujarnya. Kalau soal hanya untuk mengantisipasi

penarikan tarif tinggi, pengawasan dan penindakan oleh pihak terkait harus dilakukan pada kantong parkir tertentu, bukan harus mengeluarkan kebijakan baru yang masih kontroversi. Oleh karena itu, ia sepakat jika perencanaan itu dikaji ulang secara matang dan harus melibatkan seluruh unsur perparkeran di Kota Jogja.

Namun, kata dia, jika memang dari kajian mengharuskan adanya kebijakan menggaji juru parkir, tentu ia tak dapat berbuat banyak. Namun ia berharap gaji yang diberikan harus sesuai atau minimal di atas UMK Kota Jogja. "Tetapi itu nanti rumit sekali, karena jumlah juru parkir banyak sekali. Akan menghabiskan miliaran rupiah," kata dia.

Terpisah, salah satu juru parkir di Jalan Mataram yang enggan disebut namanya mengaku, tentu akan ada

pro kontra dengan wacana tersebut. Namun ia mengambil jalan tengah, mana yang terbaik. Jika memang harus digaji, paling tidak nominal antara Rp1,5 juta hingga di atas Rp2 juta per bulan. "Mana yang terbaik saja, tetapi kalau memang digaji ya tentu harus sesuai dengan pendapatan juru parkir selama ini," ujar dia kemarin.

Ia menambahkan, penghasilan sehari kadang tidak menentu. Namun rata-rata antara Rp40.000 hingga Rp50.000 per hari. Tetapi ada juga titik parkir tertentu di kawasan tersebut yang juga ramai.

Berbeda dengan kawasan parkir ABA, menurut penuturan Aji pendapatan juru parkir hanya Rp30.000 per hari. Angka itu turun drastis dibanding dengan sebelumnya saat Malioboro sebelum direvitalisasi, minimal

Rp100.000 dalam sehari sudah di tangan. Tempat parkir di lantai dua khusus sepeda motor tidak pernah penuh. Bahkan lantai ketiga tidak pernah terisi sama sekali. Selama direlokasi di tempat tersebut, kata dia, hanya dua kali ia memperoleh gaji lumayan. Yaitu saat Tahun Baru 2017 dan Tahun Baru Imlek, saat itu pula lantai ketiga tempat parkir baru terisi. "Waktu itu tahun baru kami mendapatkan Rp300.000, kalau Imlek Rp200.000, selain itu hanya Rp30.000 setiap harinya," jelas Ari.

Ia mengaku untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa menjual tiga unit sepeda motornya. Bahkan iuran bulanan untuk sekolah anaknya pun masih menunggak hingga enam bulan. Kondisi itu berbeda jauh saat ia masih membesut parkir di Jalan Malioboro.

Tindak Lanjut
Intuk Ditanggapi
Intuk Diketahui
umpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005